

PROSES PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH

REGIONAL INNOVATION DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION PROCESS

Arif Setiawan*¹, Muhammad Rendy², Andika Dwi Nurliansyah³,
Zidni Muhammad Ardiansyah⁴, Putra Janaz Alfinalis⁵, Adi Purnomo⁶, Akbar Maulana⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Muhammadiyah Jember
^{1,2,3,4,5,6,7}Ilmu Pemerintahan

e-mail: arifsetiawan.umj.nim26@gmail.com

ABSTRAK

Inovasi daerah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengingat tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Artikel ini membahas proses pengembangan dan implementasi inovasi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Tahapan utama dalam pengembangan inovasi ini meliputi identifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat, penelitian dan pengembangan solusi, perencanaan strategis, implementasi, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Setiap tahapan membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, akademisi, pemerintah, dan sektor swasta, untuk menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan (Zunaidi, 2024). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi daerah bergantung pada perencanaan yang matang, dukungan kebijakan, kompetensi sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya (Ramadhani *et al.*, 2024). Dengan mengikuti proses pengembangan yang sistematis, inovasi daerah dapat memberikan dampak signifikan dalam memperbaiki kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik, serta meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kata Kunci: Inovasi daerah, pelayanan publik, efektivitas, efisiensi, pengembangan inovasi, evaluasi berkelanjutan, pemangku kepentingan, kebijakan, sumber daya manusia, kepuasan masyarakat.

ABSTRACT

*Regional innovation plays an important role in improving the quality of public services, considering the challenges and needs of an increasingly dynamic society. This article discusses the process of developing and implementing regional innovation with the aim of increasing the effectiveness and efficiency of public services. The main stages in developing this innovation include identifying community needs and problems, research and solution development, strategic planning, implementation, as well as evaluation and continuous improvement. Each challenges related to technology infrastructure that is evenly distributed throughout the region and the level of digital literacy of the community that needs to be improved. Overall, the implementation of E-Government in stage requires active involvement from various stakeholders, such as society, academics, government and the private sector, to create relevant and sustainable solutions (Zunaidi, 2024). The results of the discussion show that the success of regional innovation depends on careful planning, policy support, human resource competence, and community involvement in the process (Ramadhani *et al.*, 2024). By following*

a systematic development process, regional innovation can have a significant impact on improving the quality and accessibility of public services, as well as increasing community satisfaction..

Keywords: Regional innovation, public services, effectiveness, efficiency, innovation development, continuous evaluation, stakeholders, policy, human resources, community satisfaction

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban bagi setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk berinisiatif memaksimalkan potensi sumber daya lokal guna meningkatkan pembangunan daerah. Namun, kewenangan ini tetap berada di bawah koordinasi pemerintah pusat, yang memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan publik berjalan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, dituntut untuk kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global, dengan mengintegrasikan berbagai fungsi penunjang pemerintahan, termasuk pengelolaan penelitian dan pengembangan.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah pusat yang memperluas kewenangan kepada tiap pemerintah daerah bukan hanya sebatas pemberian otoritas, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pusat untuk memastikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah pusat berharap bahwa kewenangan yang lebih luas ini dapat mendorong daerah untuk membangun dan mengatur wilayahnya sesuai tuntutan global, baik dari aspek pembangunan fisik maupun dari segi sosial dan tata kehidupan masyarakat daerah. Pada akhirnya, kemajuan atau kemunduran suatu daerah dalam merespons perubahan global sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemandirian daerah itu sendiri. Selain melaksanakan fungsi utama pemerintahan, pemerintah daerah juga dituntut menjalankan fungsi-fungsi penunjang untuk urusan yang menjadi kewenangannya.

Salah satu upaya strategis yang diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik adalah pengembangan dan implementasi inovasi daerah, termasuk penerapan e-government. Meskipun telah diinisiasi sejak 2003, penerapan e-government di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan data e-government development global index (EDGI), tingkat perkembangan e-government di Indonesia masih rendah, dengan hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang mampu memanfaatkannya secara efektif. Capaian *e-government* Indonesia Hanya mengalami peningkatan 0,1 poin dari tahun 2003 hingga 2018, jauh dari harapan yang diinginkan. Kurangnya perhatian dari pihak pemerintah terhadap implementasi *e-government* di tingkat daerah dinilai sebagai faktor utama yang memperlambat perkembangannya. Data menunjukkan bahwa hanya 0,7% atau 4 pemerintah daerah dari total 548 di Indonesia yang telah memanfaatkan *e-government* dengan baik (Rozikin *et al.*, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dalam layanan pemerintahan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan inovatif dan terencana untuk meningkatkan efisiensi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi. Pemerintah pusat telah mendorong inovasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan menguatkan kreativitas pemerintah daerah dalam merespons tantangan dan peluang di era modern.

Inovasi menjadi aspek yang esensial dalam pembangunan daerah karena dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat daya saing daerah. Dengan menggali potensi lokal melalui inovasi, nilai tambah dapat tercipta, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Citra *et al.*, 2024). Inovasi ini menjadi sebuah kebutuhan bagi pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dan berkembang. Untuk itu, berbagai tantangan dan peluang perlu dihadapi oleh pemerintah, khususnya di tingkat daerah, dalam mengimplementasikan dan mengembangkan *e-government*. Pemerintah daerah dituntut untuk berpikir kreatif dan memanfaatkan sumber daya lokal guna menghasilkan inovasi yang mendukung pelaksanaan *e-government*. Inovasi

dalam kebijakan dan administrasi pemerintahan menjadi kunci penting bagi keberlanjutan sistem pemerintahan, sebab tanpa adanya inovasi, sistem pemerintahan berpotensi mengalami stagnasi, menjadi kurang efektif, dan rentan terhadap kritik serta kegagalan. Pemerintah pusat di Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Kebijakan ini berfungsi sebagai pendorong agar daerah lebih kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Inovasi juga merupakan proses interaktif yang melibatkan berbagai pihak dan sering kali membawa perubahan bagi banyak sektor. Ini adalah proses kolektif yang tidak terbatas pada kelompok tertentu, seperti “kelas kreatif” atau “analisis simbol,” melainkan melibatkan ide dan masukan dari banyak kalangan. Dalam pelaksanaannya, inovasi memerlukan keragaman pandangan sekaligus partisipasi kolektif. Dalam konteks pemerintahan daerah, keragaman dan kolektivitas ini menjadi semakin penting dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang merupakan penjereman dari Pasal 386 hingga Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan keseimbangan dalam menjalankan inovasi pemerintahan yang efektif (Doni & Prasetyo, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Inovasi Pemerintahan

Konsep inovasi pemerintahan merujuk pada penerapan ide, proses, atau metode baru yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik (Borins, 2001; Sanger, 2013). Inovasi pemerintahan dapat berupa perbaikan layanan, pengembangan produk atau proses baru, perubahan struktur organisasi, atau penerapan teknologi informasi dan komunikasi (Moore & Hartley, 2008). Dalam konteks pemerintahan daerah, inovasi menjadi penting untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Teori Kapasitas Pemerintah Daerah

Keberhasilan implementasi inovasi di daerah juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah, yang mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran, dan dukungan kebijakan (Reddick, 2004; Andrews & Boyne, 2012). Kapasitas pemerintah daerah yang memadai akan mendukung proses pengembangan dan penerapan inovasi secara efektif.

Teori Kolaborasi Multipihak

Inovasi pemerintahan juga merupakan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta (Sørensen & Torfing, 2011; Torfing, 2019). Keterlibatan multipihak dalam setiap tahapan inovasi dapat meningkatkan relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan solusi yang dikembangkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji proses pengembangan dan implementasi inovasi daerah di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena inovasi pemerintahan daerah, termasuk tahapan, faktor-faktor pendukung, serta praktik-praktik baik dalam pengembangannya. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rinci dan komprehensif mengenai proses inovasi daerah, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, penelitian dan pengembangan solusi, perencanaan strategis, implementasi, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena inovasi daerah sesuai dengan konteks dan dinamikanya.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, yaitu:

1. Studi literatur, dengan mengkaji jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait inovasi pemerintahan daerah.
2. Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi yang terlibat dalam proses inovasi.
3. Observasi lapangan untuk memahami penerapan inovasi daerah secara langsung.
4. Analisis dokumen, termasuk laporan, rencana, dan evaluasi program inovasi daerah.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan kecenderungan yang muncul terkait pengembangan dan implementasi inovasi daerah. Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus, dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengembangan dan implementasi inovasi daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melibatkan tahapan yang sistematis dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Tahapan pertama dalam proses ini adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mengenali kebutuhan utama masyarakat serta tantangan-tantangan spesifik dalam pelayanan publik yang perlu diatasi. Identifikasi ini bisa dilakukan melalui survei, konsultasi publik, atau forum diskusi yang melibatkan masyarakat, dengan tujuan memastikan inovasi yang dikembangkan tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah kebutuhan diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan (R&D) untuk merancang solusi inovatif. Pada tahap ini, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan akademisi, pakar, serta pihak swasta untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dan efisien (Febriyanty *et al.*, 2023 inovasi yang akan diimplementasikan telah melalui uji coba dan dapat diterapkan sesuai dengan konteks lokal. Misalnya, inovasi dalam bentuk aplikasi digital untuk pelayanan publik harus diuji ketahanan sistem dan kemudahan penggunaannya bagi masyarakat.

Setelah solusi inovatif ditemukan, pemerintah daerah memasuki tahap perencanaan strategis untuk menetapkan tujuan, anggaran, serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penerapan inovasi. Perencanaan yang matang mencakup persiapan regulasi, penyiapan infrastruktur, serta pembagian peran dan tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat. Pada tahap ini, anggaran harus dialokasikan dengan tepat untuk menjamin implementasi inovasi berjalan lancar dan berkelanjutan (Sos, 2020). Selanjutnya, inovasi yang telah direncanakan masuk ke tahap implementasi, di mana solusi diterapkan di lapangan melalui keterlibatan aparatur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Tahap ini memerlukan monitoring berkala untuk memastikan bahwa inovasi berjalan sesuai rencana, serta untuk menilai apakah inovasi tersebut efektif dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Tahap terakhir dalam proses ini adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan dan dampak dari inovasi yang telah diimplementasikan. Dari hasil evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas inovasi. Evaluasi ini juga penting untuk menentukan apakah inovasi yang dilakukan layak untuk direplikasi di wilayah lain atau apakah ada inovasi tambahan yang perlu dikembangkan. Dengan demikian, proses pengembangan dan implementasi inovasi daerah memerlukan perencanaan yang matang, keterlibatan aktif berbagai pihak, dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan bahwa kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan implementasi inovasi daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah. Regulasi yang mendukung dapat memberikan landasan hukum yang kuat, memperjelas batasan dan tanggung jawab, serta memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam

mengembangkan dan menerapkan inovasi sesuai dengan karakteristik lokal. Kebijakan yang baik juga akan mendorong alokasi anggaran yang memadai serta membuka peluang bagi berbagai bentuk kemitraan yang dapat mendukung keberlanjutan inovasi. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan inovasi. SDM yang kompeten dan memiliki keterampilan teknis yang sesuai dapat mempercepat proses implementasi dan meningkatkan kualitas inovasi yang diterapkan. Pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan dan program peningkatan kapasitas bagi pegawai yang terlibat dalam implementasi inovasi untuk menjamin bahwa inovasi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Faktor penting lainnya adalah ketersediaan anggaran dan sumber daya finansial yang mencukupi. Proses inovasi, terutama yang melibatkan teknologi atau perubahan sistem, membutuhkan dana yang cukup untuk pengembangan, implementasi, serta perawatan berkelanjutan. Keterbatasan anggaran dapat menghambat proses pengembangan inovasi, menyebabkan inovasi berjalan tidak optimal, atau bahkan berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, selain mengandalkan anggaran pemerintah, pemerintah daerah perlu menjalin kemitraan dengan sektor swasta atau mencari alternatif pendanaan, seperti hibah dan bantuan dari pemerintah pusat atau lembaga internasional. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan inovasi daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses inovasi, seperti memberikan masukan, mendukung implementasi, atau menjadi pengguna langsung, akan memperkuat relevansi inovasi serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut beberapa penelitian, keterlibatan masyarakat juga membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan penerimaan inovasi.

Selanjutnya, dukungan teknologi dan infrastruktur juga berperan dalam keberhasilan implementasi inovasi daerah. Inovasi, terutama yang berbasis digital, membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan sistem keamanan data. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, inovasi berbasis digital akan sulit dijalankan, terutama di daerah yang infrastrukturnya belum berkembang. Kesiapan budaya organisasi di dalam pemerintah daerah juga menjadi faktor yang berpengaruh. Budaya organisasi yang mendukung inovasi, seperti keterbukaan terhadap ide baru, keberanian untuk mengambil risiko, serta semangat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, sangat penting untuk memastikan inovasi dapat berjalan dengan baik. Budaya yang terlalu birokratis atau resistensi terhadap perubahan sering kali menjadi penghambat dalam penerapan inovasi baru.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi inovasi daerah tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang mendukung, mulai dari kebijakan dan regulasi, kapasitas SDM, ketersediaan anggaran, partisipasi masyarakat, hingga dukungan infrastruktur dan kesiapan budaya organisasi. Pemerintah daerah yang mampu mengelola dan memaksimalkan faktor-faktor ini akan memiliki peluang lebih besar dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengembangan dan implementasi inovasi daerah bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui langkah-langkah sistematis yang melibatkan berbagai pihak. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memastikan inovasi yang dikembangkan tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, diikuti penelitian dan pengembangan solusi yang relevan, serta perencanaan strategis yang matang mencakup persiapan regulasi, penyiapan infrastruktur, serta pembagian peran dan tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat. Tahap implementasi memerlukan pemantauan untuk memastikan solusi efektif di lapangan, dan diakhiri dengan evaluasi berkelanjutan secara berkala untuk menilai keberhasilan dan dampak dari inovasi yang telah diimplementasikan serta dapat dijadikan sebagai perbaikan untuk meningkatkan efektivitas inovasi.

Keberhasilan inovasi daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan yakni antara lain seperti dukungan kebijakan, regulasi, kapasitas SDM, anggaran, partisipasi masyarakat, teknologi, serta budaya organisasi yang mendukung perubahan. Kombinasi faktor-faktor ini dapat memastikan inovasi berjalan optimal dan berkelanjutan.

Saran

Inovasi daerah merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks otonomi daerah, inovasi menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan potensi lokal. Proses pengembangan dan implementasi inovasi daerah membutuhkan pendekatan yang terstruktur, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, kolaborasi stakeholder, hingga evaluasi keberlanjutan.

1. Langkah pertama dalam pengembangan inovasi daerah adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan spesifik yang ada di masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk memahami tantangan utama yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, atau kurangnya akses terhadap teknologi. Setelah itu, perencanaan inovasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan solusi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi local.
2. Implementasi inovasi memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim yang kondusif melalui regulasi yang fleksibel, pendanaan yang memadai, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM. Selain itu, penting untuk belajar dari studi kasus daerah lain yang telah berhasil menerapkan inovasi sebagai inspirasi dan panduan praktik terbaik.
3. Tahap akhir dari proses ini adalah evaluasi dan monitoring. Inovasi daerah harus terus dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, inovasi dapat berlanjut dan berkembang menjadi solusi yang berkelanjutan, yang mampu menjawab kebutuhan daerah di masa kini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, R., & Boyne, G. A. (2012). Structural change and public service performance: The impact of the reorganization process in English local government. *Public Administration*, 90(2), 297-312.
- Borins, S. (2001). Encouraging innovation in the public sector. *Journal of Intellectual Capital*, 2(3), 310-319.
- Citra, N. P., Hadna, A. H., & Djunaedi, A. (2024). Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah: Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017-2022. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 21–50. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.252>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Doni, S., & Prasetyo, A. (2021). Pengembangan Kawasan Ekowisata Dalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida) Kabupaten Labuhanbatu Melalui Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 159–174. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.1711>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moore, M., & Hartley, J. (2008). Innovations in governance. *Public Management Review*, 10(1), 3-20.
- Ramadhani, A. D. M., Anggara, D., Purwadhi, P., & Widjaja, Y. R. (2024). Inovasi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit: Analisis Literatur Fokus pada Kepemimpinan dan

- Pengembangan Karyawan 2019-2024. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(5), 2539-2552.
- Reddick, C. G. (2004). A two-stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for US cities. *Government Information Quarterly*, 21(1), 51-64.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61-80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Sanger, M. B. (2013). Does measuring performance lead to better performance? *Journal of Policy Analysis and Management*, 32(1), 185-203.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*.